

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERIODE 2018-2020

ANALYSIS FINANCIAL PERFORMANCE OF THE MAGELANG DISTRICT GOVERNMENT IN 2018-2020

Vivit Mariasari¹, Suci Nasehati Sunaningsih²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang 56116, Jawa Tengah

¹vivitmariasari03@gmail.com ²sucinasehati@untidar.ac.id

ABSTRAK

Riset ini bertujuan guna mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Riset dilakukan dengan memanfaatkan perhitungan rasio keuangan yang meliputi rasio efektivitas pendapatan daerah, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Desain riset deskriptif kuantitatif difungsikan. Data sekunder yang difungsikan dalam analisis ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil kajian, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah efektif dalam pencapaian pendapatan asli daerahnya, dengan rata-rata rasio efektifitas 102,76 persen. Belanja daerah dikelola secara efisien, dengan proporsi rata-rata 75,65 persen. Rata-rata rasio biaya operasional sejumlah 78,92 persen dan rasio belanja modal sejumlah 19,75 persen merepresentasikan pada hakikatnya Pemerintah Kabupaten Magelang lebih mengutamakan pembiayaan biaya operasional daripada belanja modal.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Rasio Keserasian

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the Magelang District Government's financial performance between 2018 and 2020. The investigation was conducted using financial ratio calculations, which included the effectiveness ratio of local revenue, the efficiency ratio, and the expenditure harmony ratio. The descriptive quantitative research design was utilized. The secondary data utilized in this analysis is the Report on the Realization of the Magelang Regency Government's Regional Revenue and Expenditure Budget for 2018-2020. According to the study's findings, the Magelang Regency Government's financial performance has been effective in achieving its local revenue, with an average effectiveness ratio of 102.76 percent. Regional expenditures are managed efficiently, with an average proportion of 75.65 percent. The average operating expense ratio of 78.92 percent and capital expenditure ratio of 19.75 percent show that the Magelang District Government prioritized financing operational expenses over capital expenditures.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Financial Performance Of Local Government, and Expenditure Harmony Ratio*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan keuangan daerah di Indonesia mengalami perubahan besar. Otonomi daerah memberikan kepada pemerintah daerah berupa hak, kemampuan, dan kewajiban guna mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan serta kepentingan rakyatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintah daerah, khususnya hal ini penyelenggaraan keuangan daerah termasuk di dalamnya.

Perlu diketahui pada hakikatnya pemerintah daerah tidak lagi memiliki otonomi luas yang sebelumnya dimiliki oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Kekuasaan pemerintah pusat kini lebih agresif, dengan arahan guna memecat kepala daerah yang membangkang. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah bergolak selama 13 tahun terakhir. Pemerintah pusat tampak tidak efektif, hanya dengan tiga alat guna menyelenggarakan daerah: instrumen fiskal, penetapan formasi pegawai negeri, dan kekuasaan umum, seperti pencabutan peraturan daerah. Hanya dalam masalah anggaran pemerintah daerah tampak cukup loyal dan disiplin guna memenuhi persyaratan dan menyerahkan semua laporan yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Menyikapi situasi anomali yang ada hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menetapkan berbagai langkah yang ditujukan guna membenahi dan menata kembali desentralisasi agar tata kelola sektor publik menjadi lebih efektif di masa mendatang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan kekayaan daerah. harta benda sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban operasional, serta pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, ekonomis, tertib, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan akibat kinerjanya dalam menyelenggarakan keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan anggaran daerah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah ialah guna memberikan informasi tentang penyelenggaraan keuangan daerah yang dapat difungsikan guna pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna merepresentasikan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan anggaran daerahnya. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna menganalisis operasi penyelenggaraan keuangan daerah. Analisis laporan keuangan juga difungsikan guna mengevaluasi efektivitas otonomi daerah. Berbeda dengan di sektor swasta, analisis laporan keuangan di sektor publik masih belum umum dilakukan.

Sebuah kinerja ialah pencapaian sesuatu yang sebelumnya dimaksudkan. Kinerja yang baik didefinisikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Sedangkan kinerja keuangan ialah ukuran kinerja yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu indikator, khususnya indikator keuangan. Tujuan dari analisis kinerja keuangan ialah guna menguji kinerja organisasi sebelumnya dengan memanfaatkan berbagai analisis keuangan. Analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2008).

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu analisis yang dapat difungsikan guna mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Persentase ini merepresentasikan kemampuan Pemerintah Daerah guna mencapai PAD yang telah dialokasikan. Pelaksanaan PAD dianggap efektif jika proporsi rasio yang diperoleh 100 persen atau lebih. Jika rasio efektivitas yang diperoleh lebih besar, kinerja keuangan daerah dianggap lebih unggul (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2008).

Rasio efisiensi bertujuan untuk mengkomparasikan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap lebih efisien jika hasil dari persentase rasio yang diperoleh juga lebih kecil. Jika Pemerintah Daerah mampu mengejawantahkan pendapatan yang tinggi tetapi dengan pengeluaran yang tinggi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap kurang memuaskan (Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 2007).

Rasio keserasian merepresentasikan dengan jalan apa Pemerintah Daerah mendistribusikan dana dengan benar guna pengeluaran operasional atau rutin dan belanja modal. Pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak guna belanja operasional cenderung menghabiskan lebih sedikit guna membangun fasilitas dan infrastruktur daerah (Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 2007). Rasio keserasian ini mencakup dua perhitungan: rasio biaya operasional dan rasio belanja modal. Perhitungan yang pertama ialah rasio belanja operasional, yang mencerminkan proporsi belanja daerah yang dikhususkan guna belanja operasional. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial merupakan contoh biaya operasional. Rasio belanja modal muncul berikutnya, dan ini merepresentasikan berapa banyak belanja daerah yang didedikasikan guna belanja modal atau pembangunan. Belanja modal merupakan belanja daerah guna investasi jangka menengah dan panjang. Belanja modal tanah, belanja modal bangunan, dan belanja modal aset tetap

lainnya ialah contoh belanja modal. Intinya, tidak ada patokan yang tepat guna rasio biaya operasional terhadap belanja modal yang optimal. Pemerintah daerah, di sisi lain, memainkan peran penting dalam pertumbuhan suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Akibatnya, daerah dengan rasio belanja modal yang rendah harus menaikkannya guna memenuhi tuntutan pembangunan daerah.

Guncangan ekonomi akibat pandemi virus corona berdampak tak tertandingi terhadap anggaran negara. Pemerintah melakukan paket fiskal yang sangat besar, termasuk langkah-langkah anggaran dan non-anggaran, untuk memerangi epidemi, bahkan ketika penerimaan menurun secara drastis. Sangat penting untuk mengomunikasikan dampak finansial dari COVID-19 kepada semua pemangku kepentingan secara tepat waktu untuk mendapatkan dukungan luas jangka panjang. Laporan keuangan yang telah diaudit memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ringkasan kebijakan ini mempertimbangkan bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan sistem pelaporan keuangan saat ini selama pandemi, serta potensi sistem pelaporan keuangan yang lebih baik dalam iklim pasca-krisis. Ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengaruh pandemi terhadap kinerja keuangan, posisi, dan arus kas pemerintah.

Pendekatan neraca adalah melihat pembuatan kebijakan fiskal dari perspektif laporan keuangan pemerintah. Jarang negara memiliki neraca yang dikembangkan dengan cara yang sama seperti laporan keuangan sektor swasta. Namun, setiap pemerintah memiliki laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membantu membentuk pendekatan neraca. Sejauh mana suatu negara dapat menggunakan pendekatan neraca sangat tergantung pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diikutinya serta kecenderungan pengambil keputusan utama dalam menggunakan informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan dalam respons COVID-19.

Laporan keuangan berbasis kas melaporkan dampak paling langsung dari pandemi, penerimaan turun, pengeluaran naik, dan akibatnya, defisit dan utang publik bersih naik. Banyak pemerintah masih mengikuti basis tunai akuntansi, yang secara efektif melayani tujuan "kontrol" keuangan selama COVID-19. Beberapa yurisdiksi memiliki beberapa tingkat informasi berbasis akrual dalam laporan keuangan atau catatan atas akun. Contoh umum termasuk saldo utang, saldo kumulatif investasi modal selama bertahun-tahun, dan pernyataan tambahan pada item di luar anggaran. Sampai batas tertentu, semua negara yang menggunakan basis kas akuntansi juga dapat menginformasikan kebijakan fiskal mereka berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan yang dilengkapi dengan informasi dari sumber lain.

Mengingat situasi darurat, pemerintah harus menggunakan informasi keuangan dan laporan keuangan yang ada untuk pengambilan keputusan, bahkan jika itu didasarkan pada akuntansi kas. Dalam konteks ini, tidak masalah apakah pemerintah menggunakan akuntansi berbasis akrual tunai jika informasi keuangan mereka tepat waktu dan dapat diandalkan. Untuk gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak COVID-19 dan kesiapan pemerintah untuk merespons, laporan keuangan akuntansi akrual lebih bermanfaat. Mereka termasuk neraca yang memberikan gambaran lengkap tentang aset dan kewajiban, disertai dengan pengungkapan, seperti analisis jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan, dan informasi tentang kewajiban kontinjensi dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik. Dari perspektif penggunaan benchmarking dan praktik internasional terbaik, pemerintah harus terus bergerak menuju penerapan sistem akuntansi akrual berdasarkan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) atau kerangka kerja yang setara.

Beberapa riset sebelumnya tentang pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah daerah juga telah dilakukan. Sebagai contoh, Sartika melakukan riset yang menemukan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti efisien dan berhasil dalam menyelenggarakan anggaran daerahnya (Sartika, 2019). Akan tetapi, Pemerintah Kepulauan Meranti tetap harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah, kemampuan daerah guna membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, dengan jalan apa memprioritaskan alokasi dana guna belanja rutin secara optimal dan belanja pembangunan, serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.

Analisis yang dilakukan oleh Tatik merepresentasikan pada hakikatnya kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang telah berhasil dan efisien. Akan tetapi, prioritas alokasi dana belanja modal tetap pada biaya operasional (Tatik, 2020). Menurut hasil riset Qurani, kemandirian dan laju pertumbuhan daerah Kota Magelang masih rendah, dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang tidak efisien dalam hal pengeluaran kas. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, di sisi lain, dinilai efektif dalam mencapai pendapatan daerahnya (Salwa Qur'ani, 2021). Berdasarkan konteks tersebut, analisis rasio keuangan akan difungsikan guna mengetahui dengan jalan apa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2018-2020, maka diambil judul “Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020”.

METODE

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang difungsikan dalam riset ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perhitungan variabel riset (Chandrarini, 2018). Data sekunder yang difungsikan berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020. Data yang diterima dari seseorang atau badan yang mengeluarkannya disebut sebagai data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi difungsikan guna memperoleh data riset, terutama dengan mengumpulkan riset-riset pendukung yang relevan guna diteliti. Dokumen ialah catatan sejarah tentang peristiwa yang telah terjadi (Sugiarto, 2017). Dalam riset ini, dokumen yang difungsikan diperoleh dari *website* BPPKAD Kabupaten Magelang.

Teknik Analisis Data

Pendekatan kuantitatif deskriptif yang difungsikan guna menguji data dalam riset ini dihitung dengan menentukan rasio antara pendapatan dan belanja daerah. Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah, dan Rasio Aktivitas, yang meliputi Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal, menjadi tolak ukur yang difungsikan.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD ditentukan dengan memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efikasinya diwakilkan pada tabel di bawah ini (Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, 2012):

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100	Tidak Efektif
= 100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Rasio Efisiensi

Rumus berikut dapat difungsikan guna mendapatkan rasio ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel berikut merepresentasikan kategori efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, 2006):

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 60	Sangat Efisien
60 – 80	Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
>100	Tidak Efisien

Rasio Keserasian

Rasio Belanja Operasi

Rumus berikut dapat difungsikan guna menentukan rasio belanja operasi:

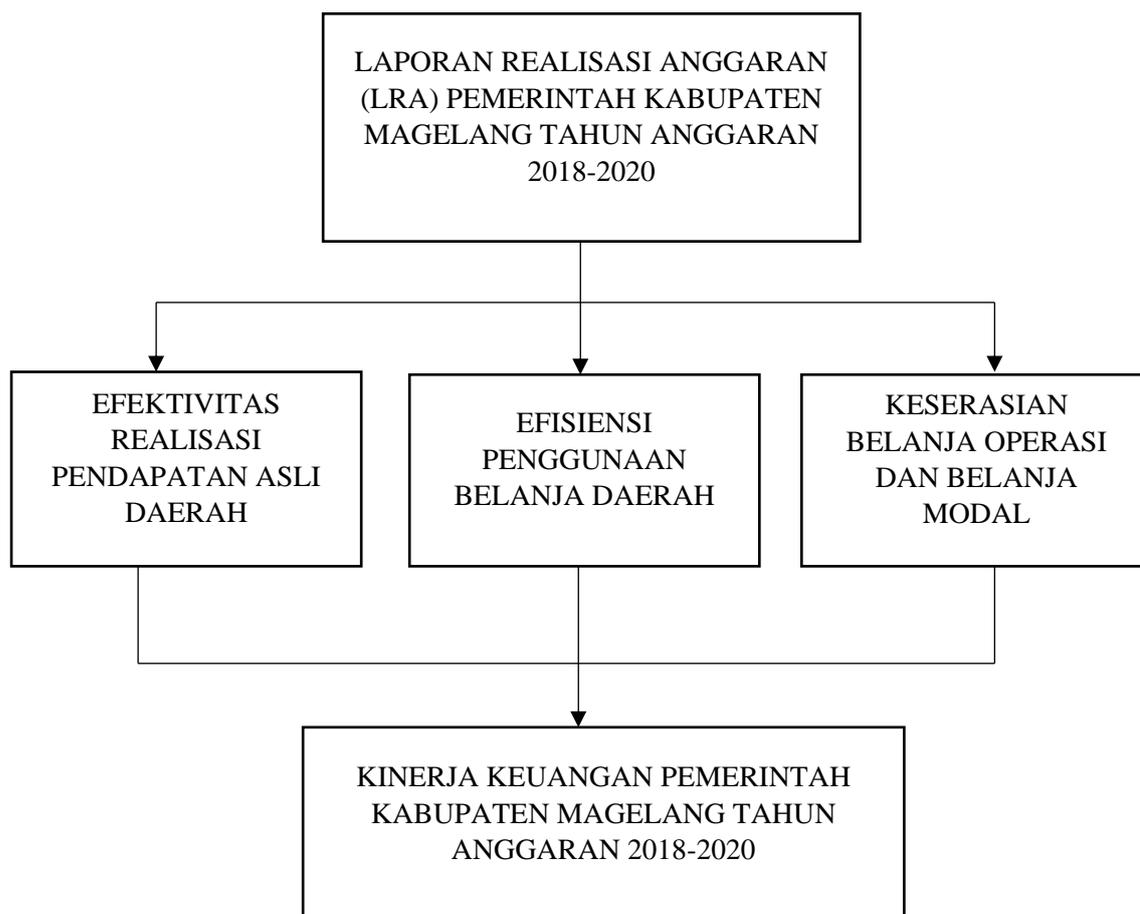
$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal dihitung dengan memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Riset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Tabel berikut merepresentasikan temuan perkiraan Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2020:

Tabel. 4 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2018	325.089.093.092	363.038.862.200	89,55	Tidak Efektif
2019	417.178.099.961	441.347.020.000	94,52	Tidak Efektif
2020	329.769.193.224	265.502.524.500	124,21	Efektif
Rata-Rata			102,76	

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat pada hakikatnya rasio efektifitas PAD Kabupaten Magelang tahun 2018 dan 2019 masih belum efektif. Hal ini terlihat dari persentase rasio yang dicapai pada tahun 2018 dan 2019 yang kurang dari 100 persen, yakni masing-masing 89,55 persen dan 94,52 persen. Sementara itu, rasio efektifitas PAD meningkat menjadi 124,21 persen pada 2020. Rasio efektifitas mengukur seberapa baik pemerintah daerah menyelenggarakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut perhitungan rasio efektifitas rata-rata, Pemerintah Kabupaten Magelang telah efektif menyelenggarakan Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun (2018-2020), dengan rasio persentase 102,76 persen.

Rasio Efisiensi

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020:

Tabel. 5 Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2018	1.957.114.127.802	2.302.190.543.616	85,01	Cukup Efisien
2019	1.884.681.713.041	2.575.439.825.755	73,18	Efisien
2020	1.636.641.956.462	2.380.457.680.604	68,75	Efisien
Rata-Rata			75,65	

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat jelas pada hakikatnya rasio efisiensi Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sangat efisien, dengan persentase rasio 85,01 persen. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 telah tumbuh dan merepresentasikan efisiensi belanja dengan persentase rasio masing-masing sejumlah 73,18 persen dan 68,65 persen. Rasio efisiensi merepresentasikan kemampuan pemerintah daerah guna mengumpulkan pendapatan daerah tergantung pada jumlah uang yang mereka gunakan. Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang sejumlah 75,65 persen, dimana angka tersebut merupakan efisiensi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendapatan daerahnya selama periode tiga tahun (2018-2020).

Rasio Keserasian

Rasio Belanja Operasi

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020:

Tabel 6. Rasio Belanja Operasi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	1.957.114.127.802	1.454.440.752.541	74,32
2019	1.884.681.713.041	1.498.077.962.197	79,49
2020	1.636.641.956.462	1.357.596.932.757	82,95
Rata-Rata			78,92

Rasio Belanja Modal

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020:

Tabel 7. Rasio Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	1.957.114.127.802	501.727.375.261	25,64
2019	1.884.681.713.041	386.529.995.844	20,51
2020	1.636.641.956.462	214.407.058.402	13,10
Rata-Rata			19,75

Berdasarkan temuan perhitungan rasio belanja operasional dan rasio belanja modal, dapat disimpulkan pada hakikatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih mengutamakan belanja operasional atau belanja rutin dalam mendistribusikan uang belanja daerah. Hal ini tercermin dalam persentase rasio biaya operasional yang lebih tinggi, sedangkan persentase rasio belanja modal masih relatif rendah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan hasil analisis keuangan daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Analisis Rasio Keuangan

Jenis Rasio	Rata-Rata Rasio (%)	Keterangan
Rasio Efektifitas	102,76	Efektif
Rasio Efisien	75,65	Efisien
Rasio Kecerahan		Kurang Serasi
Rasio Belanja Operasi	78,92	
Rasio Belanja Modal	19,75	

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan daerah di Kabupaten Magelang yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah dianggap efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah-nya selama 3 (tiga) tahun terakhir. Rasio efisiensi penggunaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2018-2020 juga terbilang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan besaran presentase rata-rata rasio efisiensi yang mencapai nilai sebesar 75,65%. Untuk rasio keserasian, pemerintah daerah kabupaten Magelang masih terfokus pada alokasi belanja operasi dibandingkan dengan pengalokasian belanja modalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dana belanja daerah masih memprioritaskan pada belanja operasi sehingga presentasi belanja modalnya masih rendah.

Ketika pembuat kebijakan perlu mengambil tindakan segera setelah merebaknya virus corona, mereka perlu mendapat informasi yang baik tentang posisi keuangan pemerintah. Jika tidak ada laporan keuangan terbaru yang tersedia, pembuat kebijakan harus terus mengandalkan laporan kas harian dan laporan lain dari sistem informasi manajemen, dan mungkin tidak memiliki gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan dan posisi untuk menilai kekuatan pemerintah dalam menghadapi krisis. Agar pernyataan-pernyataan ini bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, pernyataan-pernyataan tersebut harus tersedia dalam jangka waktu yang wajar setelah akhir tahun fiskal. Kegunaannya terganggu jika tidak tersedia dalam jangka waktu yang diabdikan dalam kerangka hukum dan peraturan pemerintah.

Pada waktu normal, laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya harus tiba tepat waktu untuk dipertimbangkan ketika memutuskan anggaran untuk tahun berikutnya. Di masa pandemi COVID-19 contohnya, informasi keuangan terkini bahkan lebih penting. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan pemerintah, laporan keuangan perlu mencakup pemerintah pusat dan entitas yang dikendalikannya. Hal ini membuat persiapan yang tepat waktu menjadi lebih menantang karena memerlukan tersedianya laporan keuangan yang telah diaudit dari semua entitas yang dikendalikan secara signifikan. Selain itu, mengingat sifat pandemi yang berubah dengan cepat, dan

jumlah penting dari tindakan fiskal yang terlibat, ketersediaan informasi keuangan terkini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memungkinkan pemerintah mengambil keputusan secara tepat waktu. Laporan keuangan interim adalah satu set lengkap atau ringkas laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun keuangan penuh entitas.

Namun, pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam mempersiapkan pernyataan tersebut mengingat penggunaan intensif pekerjaan jarak jauh dan tidak adanya investasi sebelumnya dalam teknologi tepat guna. Ini harus dipertimbangkan dan ditangani jika memungkinkan. Tidak peduli apakah laporan keuangan tahunan atau interim, diskusi dan analisis mereka sangat penting untuk menganalisis dan menjelaskan item material, perbedaan, dan varians terhadap pembanding. Komentar adalah kesempatan untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pengguna dengan menjelaskan angka besar secara material dan perubahan signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini berguna untuk menghasilkan bahan ringkasan yang dapat diakses dan narasi yang tepat dan catatan dalam laporan keuangan. Narasi yang menyertai dalam laporan keuangan membantu pengguna memahami angka-angka tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian di atas, dapat disimpulkan pada hakikatnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tumbuh cukup pesat antara tahun 2018 hingga 2020. Hal ini diwakilkan dengan tercapainya rasio efisiensi rata-rata pemanfaatan belanja daerah sejumlah 75,65 persen dan rata-rata efektivitas realisasi pendapatan asli daerah sejumlah 102,76 persen. Akan tetapi, penyaluran dana belanja daerah guna Pemerintah Kabupaten Magelang tetap dipusatkan pada belanja operasional atau rutin daripada belanja konstruksi. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase temuan rasio kesesuaian yang merepresentasikan rasio belanja operasional sejumlah 78,92 persen dan rasio belanja modal sejumlah 19,75 persen.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengkaji kembali proporsi alokasi belanja operasional dan belanja modal yang ideal dan optimal. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang ada di masa mendatang. Banyaknya variabel yang difungsikan dalam riset ini merupakan kelemahan riset ini. Diyakini pada hakikatnya peneliti masa depan akan dapat memperluas faktor-faktor yang difungsikan, mengejawantahkan hasil studi yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- BPPKAD Kabupaten Magelang. (2021, Mei 05). *Sibata Online: Bankdata*. Retrieved from <http://www.sibata.magelangkab.go.id>
- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Pramono, J. (2011). Analisis Rasio Keuangan Guna Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *STIE AMA Salatiga*.
- Salwa Qur'ani, E. K. (2021). Analysis Of Territory Financial Ratio As Performance Value In The Government Of Magelang City. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5 (1), 60-70.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah guna Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147-158.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Riset Bisnis*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.

Tatik, M. R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. *Seminar Nasional Akuntansi III Universitas Pamulang*.